

## PEMKAB BUTON LAKSANAKAN AKSI BERGIZI UNTUK PERCEPAT PENURUNAN STUNTING



Sumber gambar: <https://butonkab.go.id/detail/kafilah-buton-di-mtq-ke-xxx-sultra-resmi-diberangkatkan>  
<https://butonkab.go.id/detail/pemkab-buton-laksanakan-aksi-bergizi-untuk-percepat-penurunan-stunting>

### Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Buton, melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, menggelar program Aksi Bergizi sebagai langkah strategis percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan ini berlangsung di SMPN 08 Buton di Pasarwajo, Kamis pagi, 24 Oktober 2024.

Program Aksi Bergizi ini dirangkaikan dengan implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Aksi Strategis Pelayanan Integrasi Kesehatan Sekolah “Asyik School” yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Buton, Syafaruddin, S.KM., M.Kes. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan siswa sekolah, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.

Dalam acara tersebut, para siswi mendapatkan tablet penambah darah setelah sebelumnya menerima sarapan gratis, sebagai bagian dari edukasi gizi yang dikombinasikan dengan pemberian suplemen untuk mendukung kesehatan mereka. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., yang mewakili Pj. Bupati Buton dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Pemkab Buton mendukung penuh program Aksi Bergizi dan Asyik School. “Kami berharap agar para remaja putri secara rutin mengonsumsi tablet penambah darah setiap minggunya. Langkah ini

diharapkan dapat mencegah stunting dan menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Buton, Syafaruddin, S.KM., M.Kes., menjelaskan bahwa tujuan umum dari program ini adalah meningkatkan status kesehatan anak sekolah dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. “Tujuan khususnya adalah meningkatkan literasi warga sekolah tentang pentingnya konsumsi tablet penambah darah, olahraga, dan asupan gizi yang cukup. Semoga dengan Aksi Bergizi, komitmen lintas sektor dapat terus diperkuat untuk keberlanjutan program ini,” jelasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Buton, Ny. Wa Ode Naharia, S.PKP., M.M., Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Buton, Ny. Kiki Amalia, serta sejumlah Kepala OPD, anggota TP PKK, dan DWP Kabupaten Buton.

### **Sumber Berita:**

1. <https://butonkab.go.id/detail/pemkab-buton-laksanakan-aksi-bergizi-untuk-percepat-penurunan-stunting> “Pemkab Buton Laksanakan Aksi Bergizi untuk Percepat Penurunan Stunting”, tanggal 24 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/baubau/kesehatan/1069981/pemkab-buton-gelar-aksi-bergizi-di-sekolah-cegah-stunting> “Pemkab Buton Gelar Aksi Bergizi di Sekolah Cegah Stunting”, tanggal 25 Oktober 2024.

### **Catatan:**

Terkait Penurunan Stunting diatur pada

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
  - a. Pasal 1 pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
      - a) menurunkan prevalensi Stunting;
      - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
      - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
      - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
      - e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
  - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

- (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
- c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.